



# LAPORAN KINERJA

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  
Kabupaten Sukabumi**

**TAHUN**

**20**

**25**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dapat kami susun sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dalam rangka Akuntabilitas Kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2025. Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mudah-mudahan dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih

Sukabumi, 15 Januari 2026

**KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SUKABUMI**



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I .....	7
PENDAHULUAN .....	7
1.1    Latar Belakang .....	7
1.2    Maksud dan Tujuan.....	12
1.3    Tugas Pokok dan Fungsi .....	12
1.4    Susunan Organisasi .....	13
1.5    Landasan Hukum .....	15
BAB II .....	16
PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1    Rencana Strategis .....	16
2.1.1    Visi.....	16
2.1.2    Misi.....	17
2.1.3    Rencana Strategi Organisasi .....	17
2.2    Perjanjian Kinerja.....	21
2.3    Rincian Rencana Anggaran Tahun 2025 .....	23
BAB III .....	27
AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.2    Realisasi Anggaran .....	41
BAB IV .....	47
PENUTUP .....	49

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dititik beratkan pada pelayanan publik dalam bidang pembinaan dan pengembangan koperasi UKM dalam rangka memperlancar roda perekonomian. Pentingnya pelayanan tersebut dalam rangka peningkatan koperasi UKM dalam menunjang visi Kabupaten Sukabumi.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut:

### **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

Untuk mencapai VISI yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan
3. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha
4. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal
6. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor
7. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan
8. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal
9. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
10. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga
11. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
12. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
13. Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
14. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
15. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan
16. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
17. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
18. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
19. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan
20. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
21. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan
22. Mengentaskan desa sangat tertinggal dan tertinggal
23. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sukabumi yang mendukung e-goverment
24. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

25. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
26. Meningkatkan budaya baca masyarakat
27. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing
28. mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
29. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal
30. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian
31. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar
32. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKJ dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 5 Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Laporan Kinerja (LKJ) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Keterbatasan KUMKM dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif (pembiayaan, Pasar, Teknologi, Informasi dan Legalitas Usaha), rendahnya jiwa kewirausahaan dan Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan KUMKM di Kab. Sukabumi. Karenanya banyak KUMKM yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah usaha. Selain itu, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi.

Aspek strategis dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) mencakup berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi serta UMKM di suatu daerah atau negara. Berikut adalah beberapa aspek strategisnya:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk;
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil;
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja;
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis;
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peraturan kewirausahaan;
6. Kebijakan dan Regulasi, meliputi:
  - a. Menyusun regulasi yang mendukung kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM.
  - b. Mendorong reformasi birokrasi untuk penyederhanaan perizinan usaha.
  - c. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
7. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, meliputi:
  - a. Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan managerial dan teknis.
  - b. Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi dan digitalisasi bisnis.
  - c. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan.
8. Akses Permodalan dan Keuangan, meliputi:

- a. Memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
  - b. Mendorong skema pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat (KUR).
  - c. Membantu koperasi dalam pengelolaan dana dan investasi yang berkelanjutan.
9. Pemasaran dan Akses Pasar, meliputi:
- a. Membantu UMKM masuk ke pasar nasional dan internasional.
  - b. Mendorong penggunaan e-commerce dan pemasaran digital.
  - c. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan besar atau ritel modern.
10. Kemitraan dan Kolaborasi, meliputi:
- a. Membangun kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional.
  - b. Mengembangkan ekosistem bisnis yang mendukung koperasi dan UMKM.
  - c. Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan UMKM.
11. Penguatan Kelembagaan Koperasi, meliputi:
- a. Meningkatkan tata kelola dan profesionalisme koperasi.
  - b. Memastikan koperasi beroperasi secara transparan dan akuntabel.
  - c. Mendorong koperasi berbasis digital agar lebih kompetitif
12. Infrastruktur dan Lingkungan Usaha, meliputi:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana bagi UMKM seperti sentra industri kecil dan pusat inkubasi bisnis.
  - b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bebas dari praktik ekonomi tidak sehat.

Dengan memperkuat aspek-aspek strategis tersebut, Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan daya saing serta kesejahteraan pelaku usaha kecil dan Koperasi. Adapun, permasalahan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Data yang berkaitan dengan UMKM belum terintegrasi. Data yang berkaitan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi kurang lengkap. Perlu dilakukan validasi mengenai data tersebut dan harus terukur kriteria validasinya. Data yang berkaitan dengan UMKM juga perlu dirapikan hingga klasterisasi data supaya dapat digunakan dengan mudah untuk pengembangan kebijakan selanjutnya berkaitan dengan kredit maupun pelatihan dan lain-lain.
2. Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing. Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

3. Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif. Koperasi saat ini dianggap kuno bagi para milenial. Selain itu, kurangnya kualitas SDM, kelembagaan dan pengawasan koperasi menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi saat ini.
4. Adanya ketidaksesuaian antara anggaran dengan kebutuhan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, maka ditetapkan 3 isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu:

1. Database Pelaku Usaha Mikro;
2. Daya Saing Pelaku Usaha Mikro;
3. Koperasi yang Unggul dan Kompetitif;

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha ekonomi dapat dibagi menjadi permasalahan umum (general) dan permasalahan kinerja yang lebih spesifik, diantaranya:

1. Permasalahan Umum (General) Pelaku Usaha Ekonomi Kelas
  - a. Modal Terbatas, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan mendapatkan modal untuk berkembang.
  - b. Persaingan Ketat, persaingan dengan usaha serupa baik dari usaha kecil atau menciptakan perusahaan besar yang sering menjadi tantangan utama.
  - c. Kurangnya Inovasi, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tren pasar atau menciptakan nilai tambah bagi produk/jasa.
  - d. Regulasi dan Perizinan, proses birokrasi yang rumit dan pajak yang tinggi bisa menghambat usaha.
  - e. Akses Pasar yang Terbatas, kesulitan dalam menjangkau konsumen yang lebih luas atau masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
  - f. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi, banyak usaha yang masih menggunakan metode konvensional dan belum beralih ke digitalisasi.
  - g. Kurangnya Sumber Daya Manusia
  - h. Daya saing UMKM masih rendah. Teknologi yang dimiliki oleh para pelaku usaha UMKM sebagian besar masih tradisional. Untuk itu, perlu direalisasikan program digitalisasi UMKM. Namun, hal ini terkendala dengan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang belum mempunyai daya saing.
2. Permasalahan Kinerja dari Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kelas  
Permasalahan kinerja lebih berfokus pada faktor yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha, diantaranya:

- a. Efisiensi Produk Rendah, banyak usaha masih menghadapi biaya produksi yang tinggi karena teknologi yang belum optimal atau manajemen yang kurang baik.
- b. Daya Saing Produk Lemah, produk kurang menarik atau tidak memiliki keunikan dibanding pesaing
- c. Manajemen Keuangan yang Buruk, kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti arus kas yang tidak sehat atau utang yang berlebihan
- d. SDM yang Kurang Kompeten, keterampilan tenaga kerja yang belum memadai untuk meningkatkan daya saing usaha
- e. Strategi Pemasaran yang Kurang Efektif, masih banyak usaha yang belum mampu memanfaatkan digital marketing atau strategi pemasaran yang tepat
- f. Tingkat Retensi Pelanggan Rendah, kesulitan dalam mempertahankan pelanggan akibat kurangnya pelayanan atau inovasi yang menarik.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi Tujuan dari penyusunan LKJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan mengetahui pencapaian kinerja yang terukur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam resntra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, diatur dengan Peraturan Bupati Sukabumi No. 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

Atas dasar Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah: “ Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah” Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang perdagangan dan tertib niaga; sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi; dan bina usaha mikrokecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang perdagangan dan tertib niaga; sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi; dan bina usaha mikrokecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- e. Pembinaan administrasi dilingkungan dinas;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- h. Penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- i. Pengawasan dan Pengendalian pasca penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas, dan;
- m. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas.

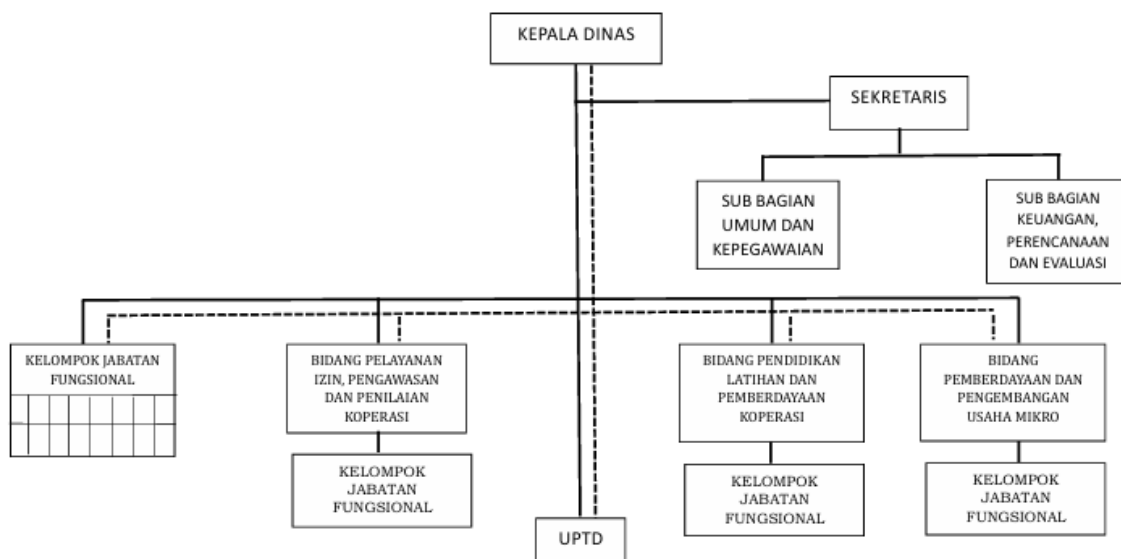
#### **1.4 Susunan Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi di atur melalui Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pelayanan Izin, Pengawasan, dan Penilaian Koperasi

1. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja atau sebagai ketua Tim Kerja Pelayanan Izin Usaha Koperasi;
  2. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  3. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Penilaian KSP/USP Koperasi.
- d. Bidang Pendidikan Latihan dan Pemberdayaan Koperasi
1. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Kapasitas dan Kompetensi SDM;
  2. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Pemberdayaan Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
1. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro;
  2. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro;
  3. Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan struktural memimpin unit kerja dan/atau sebagai ketua Tim Kerja Fasilitasi Perizinan dan Kemitraan Usaha Mikro.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi:



**Gambar 1.1** Bagan Struktur Organsiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi didukung oleh 73 orang pegawai dengan status kepegawaian yang meliputi 30 orang PNS, dan 43 Tenaga Kontrak Dinas/Honorer.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai DKUKM Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

No.	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	7	20
2	Golongan III	16	45,71
3	Golongan II	2	5,71
4	Golongan IX	10	28,57
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>

### **1.5 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan LKJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rancana Strategis**

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

##### **2.1.1 Visi**

Visi adalah cara pandang ke depan menyangkut ke mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi harus di bawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang harus diraih yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

**2.1.2 Misi**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa penyusunan dokumen RKP Kabupaten yang melaksanakan Pilkada harus berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi-misi serta program prioritas kepala daerah terpilih dan memperhatikan RKP. Dimana RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Tahap IV tentang inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan visi **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**.

Sejalan dengan Visi tersebut terdapat 4 (empat) misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan ditempuhkan, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke - 2 (dua) yaitu **“ Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”**.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.

**2.1.3 Rencana Strategi Organisasi**

A. Tujuan

Tujuan atas misi ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan”.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Thn 2021	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi Mikro	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	1%	1%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	13.4%

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan SDM dan kualitas produk usaha mikro sesuai dengan pemetaan kebijakan dan intervensi yang dilakukan;
2. Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha mikro;

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Thn 2021	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi Mikro	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	1%	1%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	13,4%

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas kemitraan antar koperasi dan badan usah lainnya yang saling menguntungkan;
2. Perlunya peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM;
3. Penataan pengelolaan koperasi dan UMKM;
4. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

**Tabel 2.3 Rencana Kerja yang Ingin Dicapai Pada Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	Naik Kelas dibagi kedalam 3 kategori, meliputi:  1. Informal ke Formal (NIB/Legalitas)  2. Pendidikan dan Pelatihan  3. Masuk Kedalam Pasar Semi Modern	$\frac{\text{Jumlah UMKM Naik Kelas}}{\text{Jumlah UMKM Binaan 2024}} \times 100\%$	%	3,43%

**Tabel 2.4 Sasaran Strategis Jangka Menengah Indikator Kinerja Program (IKPD)**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formulasi	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja 2025
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
2.17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Pemohonan Izin KSP	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Mengajukan Izin KSP}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	%	NA	100
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diawasi}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	%	1	4,7
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	%	NA	5,4

		yang Berpredikat Cukup Sehat				
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kapasitas Koperasi	<u>Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan x100%</u> Jumlah Koperasi Aktif	%	1	41,66
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	<u>Jumlah Koperasi yang Berkinerja Baik x100%</u> Jumlah Koperasi Aktif	%	NA	34,89
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha Mikro <u>Yang Terfasilitasi Permodalan dan Pemasaran x100%</u> Jumlah Pelaku UKM yang Dibina	%	0.5	10,36
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	<u>Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru x100%</u> Jumlah Pelaku UKM yang Dibina	%	0.2	4,30

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Unsur-Unsur Perjanjian Kinerja, meliputi:

1. Latar belakang, dasar hukum, dan tujuan perjanjian kinerja.
2. Identitas pihak yang bersepakat.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja yang terukur (kuantitas, kualitas, dan waktu) dan target yang harus dipenuhi dalam periode tertentu.
4. Sumber Daya yang diperlukan, dan anggaran yang digunakan.

Dengan adanya perjanjian kinerja, dinas dapat lebih fokus dalam mencapai hasil yang diharapkan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif.

**Tabel 2.5 Rencana Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2025**

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	43.758.000	34.358.000
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	98.992.000	85.552.000
3	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	42.250.000	24.982.800
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	412.000.000	448.180.000
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	405.000.000	1.113.820.000
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.389.240.000	1.215.578.900
7	Program Pengembangan UMKM	850.000.000	702.085.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>3.241.240.000</b>	<b>3.624.556.700</b>

2.3 Rincian Rencana Anggaran Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
5	6	7	8	9	10	11
						12.491.792.621
02.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		%	100	100	8.876.322.821
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	62.740.200
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.284.133.505
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	27.741.000
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	124.882.500
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	794.008.760
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	421.401.000
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	1.136.415.856
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.025.000.000
2.17.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>62.740.200</b>
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	30.159.000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.500.000
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.500.000
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	10.235.200
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	5.346.000
2.17.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5.284.133.505</b>
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	23	5.215.092.305
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	12.186.000
2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	12.466.200
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.960.000

*Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi*

2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	4	10.204.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	17.255.000
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	9.970.000
<b>2.17.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27.741.000</b>
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	4.605.200
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.136.000
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	17.999.800
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>124.882.500</b>
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	50.000.000
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	5.500.000
2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	6.049.000
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	9.333.500
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	70	54.000.000
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>794.008.760</b>
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	13.885.100
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	77.198.000
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	17.971.100
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	166.112.460
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	25.158.100
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	373.800.000
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20.500.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	88.920.000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	5.464.000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>421.401.000</b>
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	421.401.000
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.136.415.856</b>
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	79.100.000
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	10.000.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.047.315.856
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1.025.000.000</b>
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	12	12	428.800.000

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	12.000.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.000
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	548.000.000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	16	11.200.000
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>34.358.000</b>
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>34.358.000</b>
2.17.02.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30	30	34.358.000
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Akuntabel</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>4,7</b>	<b>85.552.000</b>
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>85.552.000</b>
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	50	50	85.552.000
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>5,4</b>	<b>24.982.800</b>
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>24.982.800</b>
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	30	34	24.982.800
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>41,66</b>	<b>448.180.000</b>
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>461</b>	<b>492</b>	<b>448.180.000</b>
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	511	512	448.180.000
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Presentase Koperasi yang berkualitas</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>34,89</b>	<b>1.113.820.000</b>
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>35</b>	<b>412</b>	<b>1.113.820.000</b>
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	30	30	15.000.000
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	389	389	1.018.050.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	25	26	26.150.000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	22	54.620.000

2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>10,36</b>	<b>1.206.492.000</b>
2.17.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1.206.492.000</b>
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	150	150	200.000.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	120	120	75.000.000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	360	360	200.000.000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	320	320	223.317.000
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	50	50	75.000.000
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	100	100.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1000	1000	43.935.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	390	390	298.326.900
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>	<b>%</b>	<b>3,10</b>	<b>4,30</b>	<b>702.085.000</b>
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skaia Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>702.085.000</b>
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	702.085.000

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 diukur untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2025, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2025			Capaian s/d Akhir Periode RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan								
T2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	SS11. Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	%	13,4	2,5	3,43	137,2	100%

Tabel 3.2 Target dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas	Indikator Kineja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Tahun 2025 (%)		Keterangan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100	43,758,000	100	34.358.000	100	78,5	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Akuntabel	%	4	98,992,000	4,7	85.552.000	117,5	86,4	
	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat Cukup Sehat	%	5	42,250,000	5,4	24.982.800	108	59,1	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	348,180,000	41,66	448.060.000	4.166	128,6	

	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	4	1,113,820,000	34,89	1.113.655.000	872,25	107,23	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dan Pemasaran	%	10	1,389,240,000	10,36	1.194.394.009	103,6	85,97	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	3.1	850,000,000	4,30	689.302.100	142,86	81,1	
<b>TOTAL</b>										

Tabel 3.2 Target dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2025		REALISASI 2025	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
					Target		Target	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>							
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	N/A	100%	34.358.000	100%	34.358.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	0	4%	85.552.000	4,7%	85.552.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	N/A	5%	24.982.800	5,4%	24.982.800
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	1%	448.180.000	41,66%	448.060.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	N/A	4%	1.113.820.000	34,89%	1.113.655.000
2.08.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,5	10%	1.206.492.000	10,36 %	1.194.394.009
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,92	3,10%	702.085.000	4,30 %	689.302.100

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Tahun 2025 (%)		Keterangan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100	43.758.000	100	34.358.000	100	34.358.000	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Akuntabel	%	4	98.992.000	4	85.552.000	100	85.552.000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	5	42.250.000	5	24.682.800	100	24.682.800	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	448.180.000	99,97	448.060.000	99,97	448.060.000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	4	1.113.820.000	99,99	1.113.655.000	99,99	1.113.655.000	
72.17.02	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dan Pemasaran	%	10	1.389.240.000	99,43	1.199.624.009	99,43	1.199.624.009	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	3,1	850.000.000	98,58	692.102.100	98,58	692.102.100	



**Tabel 3.3 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024				Tahun 2025		
			Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(6)	(7)
1	Meningktanya Pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis Agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	%	2.5	3.01	120%	2.5	3,43	137,2%

Tabel 3.4 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021 S/D 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin KSP/ Jumlah Koperasi aktif x 100%	%	100	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100 %	100	-	100	100 %	100	100	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Akuntabel	Jumlah koperasi yang diawasi/jumlah koperasi aktif x 100	%	1	2%	3%	4	5	1	2%	3%	4%	-	100	117%	100	-	-
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredik	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/jumlah	%	5	5%	5%	5	5	0	3%	5%	-	-	0	63%	100	-	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
		at cukup sehat	koperasi aktif x 100																
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pelatihan/ Jumlah Koperasi yang aktif x 100%	%	1	1%	1%	1	1	1	8,2 %	14,7 2%	-	-	100	820 %	1472	-	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Jumlah Koperasi yang berkinerja baik/jumlah koperasi yang aktif x 100	%	1	2%	3%	4	5	1	2%	5,7	-	-	100	104 %	190	-	-
72.17.02	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan	Jumlah pelaku Usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dan pemasaran	%	2.5	5%	7,5 %	10	12,5	2.5	5,5 %	7,58 %	-	-	100	109 %	101,07	-	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
	Mikro (UMKM)	Akses Permodalan Dan Pemasaran	/jumlah pelaku Ukm yg dibina x 100%																
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru / jumlah pelaku Ukm yg dibina x 100%	%	1,80	2,11%	2,60%	3,1	3,7	1,80	3,3%	2,94%	-	-	100	158%	113,08	-	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
		Wirausaha																	

Tabel 3.5 Target dan Capaian Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2021 s/d 2026

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Thn 2021	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026	Realisasi				Ket
					Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026		Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi Mikro	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	1%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	13.4%	2,50%	2,50%	3.01%	3.43%	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
5	6	7	8	9	10	11	12
						12.491.792.621	12.359.901.332
02.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		%	100	100	8.876.322.821	8.769.597.423
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	62.740.200	62.705.200
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.284.133.505	5.250.417.880
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	27.741.000	27.736.000
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	124.882.500	124.082.500
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	794.008.760	791.119.408
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	421.401.000	415.643.500
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	1.136.415.856	1.122.830.838
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.025.000.000	975.062.097
2.17.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>62.740.200</b>	<b>62.705.200</b>
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	30.159.000	30.129.000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.000.000	3.000.000
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	1	4.500.000	4.500.000

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.500.000	4.500.000
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	4.995.000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	10.235.200	10.235.200
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	5.346.000	5.346.000
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5.284.133.505</b>	<b>5.250.417.880</b>
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	23	5.215.092.305	5.181.404.680
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	12.186.000	12.186.000
2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	12.466.200	12.466.200
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.960.000	6.960.000
2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	4	10.204.000	10.199.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	17.255.000	17.236.000
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	9.970.000	9.966.000
<b>2.17.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27.741.000</b>	<b>27.736.000</b>
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	4.605.200	4.605.200
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.136.000	5.131.000
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	17.999.800	17.999.800
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>124.882.500</b>	<b>124.082.500</b>
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	50.000.000	49.200.000

2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	5.500.000	5.500.000
2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	6.049.000	6.049.000
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	9.333.500	9.333.500
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	70	54.000.000	54.000.000
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>794.008.760</b>	<b>791.119.408</b>
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	13.885.100	13.684.700
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	77.198.000	76.960.000
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	17.971.100	17.723.500
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	166.112.460	164.857.350
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	25.158.100	24.380.100
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	373.800.000	373.800.000
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20.500.000	20.500.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	88.920.000	88.777.758
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	5.464.000	5.436.000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>421.401.000</b>	<b>415.643.500</b>
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	421.401.000	415.643.500
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.136.415.856</b>	<b>1.122.830.838</b>
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	79.100.000	69.814.982
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.047.315.856	1.043.015.856

2.17.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>975.062.097</b>
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	428.800.000	385.121.597
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	12.000.000	12.000.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.000	24.621.800
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	548.000.000	542.118.700
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	16	11.200.000	11.200.000
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>34.358.000</b>	<b>34.358.000</b>
2.17.02.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang terverifikasi untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>34.358.000</b>	<b>34.358.000</b>
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30	30	34.358.000	34.358.000
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Akuntable</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>4,7</b>	<b>85.552.000</b>	<b>85.552.000</b>
2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>85.552.000</b>	<b>85.552.000</b>
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	50	50	85.552.000	85.552.000
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>5,4</b>	<b>24.982.800</b>	<b>24.982.800</b>
2.17.04.2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koperasi</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>24.982.800</b>	<b>24.982.800</b>
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	30	34	24.982.800	24.982.800
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>41,66</b>	<b>448.180.000</b>	<b>448.060.000</b>

2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	461	492	448.180.000	448.060.000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	511	512	448.180.000	448.060.000
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Presentase Koperasi yang berkualitas</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>34,89</b>	<b>1.113.820.000</b>	<b>1.113.655.000</b>
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi	35	412	1.113.820.000	1.113.655.000
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	30	30	15.000.000	15.000.000
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	389	389	1.018.050.000	1.017.950.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	25	26	26.150.000	26.150.000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	22	54.620.000	54.555.000
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>10,36</b>	<b>1.206.492.000</b>	<b>1.194.394.009</b>
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dari Sisi Akses Modal dan Pemasaran	Usaha Mikro	350	350	1.206.492.000	1.194.394.009
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	150	150	200.000.000	199.345.009
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	120	120	75.000.000	75.000.000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	360	360	200.000.000	195.618.000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	Orang	320	320	223.317.000	223.185.000

	Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	50	50	75.000.000	69.861.000
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	100	100.000.000	99.085.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1000	1000	43.935.000	43.070.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	390	390	298.326.900	289.230.000
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>	<b>%</b>	<b>3,10</b>	<b>4,30</b>	<b>702.085.000</b>	<b>689.302.100</b>
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>702.085.000</b>	<b>689.302.100</b>
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	702.085.000	689.302.100

### 2.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8

#### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja > 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningktanya Pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis Agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Persentase Pelaku Usaha Naik Kelas	137,2	98,94	4,2

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi telah berhasil mengelola anggaran secara efisien sehingga Indikator Kinerja Utama dapat dicapai 1137,2% dengan penyerapan keseluruhan anggaran 98,94% sehingga efisiensi sebesar 4.2 %. Adapun Anggaran yang mendukung dalam kedua indikator tersebut terdapat dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dan Program Pengembangan UMKM.

Kunci Keberhasilan/ Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja yang perlu dipertahankan (Hal yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan) yaitu:

- 1) Sinergitas Kemitraan Pemasaran Produk antara PUMK dengan Pengusaha Besar/Pasar Modern
- 2) Temu Intermediasi antara Pelaku Usaha Mikro dengan Lembaga Keuangan
- 3) Modernisasi Legalitas Usaha Berbasis Digital
- 4) Peningkatan Kualitas Packaging dan Branding Produk
- 5) Seminar Pemasaran Produk Secara Online dan Akses Permodalan bagi Calon Wirausaha Baru
- 6) Pengembangan Pemasaran Produk Usaha Mikro Berbasis ModernisasiStrategi menyelesaikan permasalahan umum atau kinerja dalam usaha ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha ekonomi kecil (UMKM), Berikut adalah upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

1. Peningkatan Produktivitas
  - Meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi atau teknologi sederhana
  - Melatih karyawan dalam keterampilan teknis dan manajemen.
2. Peningkatan Pemasaran & Digitalisasi
  - Memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk memperluas pasar
  - Menggunakan strategi pemasaran berbasis data untuk memahami kebutuhan pelanggan.
3. Pengelolaan Keuangan & Modal
  - Mengelola keuangan dengan sistem pencatatan yang lebih baik
  - Mengakses pembiayaan dari pemerintah atau fintech yang sesuai.
4. Inovasi Produk & Layanan
  - Mengembangkan produk baru berdasarkan tren dan kebutuhan pasar.
  - Meningkatkan layanan pelanggan agar lebih kompetitif.
5. Kemitraan dan Jaringan Bisnis
  - Menjalinkan kerja sama dengan usaha lain, komunitas, atau asosiasi bisnis. Mengikuti program inkubasi atau mentoring bisnis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Untuk Capaian Realisasi Anggaran Keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sebesar 89.40 % dengan Predikat kinerja “Baik”, untuk capaian programnya diantaranya:

1. Capaian Realisasi Anggaran Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 99,92% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
2. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 99,84% dan capaian Kinerjanya sebesar 100 %;
3. Capaian Realisasi Anggaran Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 99,84% dan capaian Kinerjanya sebesar 100 %;
4. Capaian Realisasi Anggaran Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar 99,99% dan capaian Kinerjanya sebesar 4166% Dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan target tahun 2025 dalam Renstra hanya 1% dari Jumlah Koperasi yang mendapatkan pelatihan/ Jumlah Koperasi yang aktif sehingga capaian melebihi target;
5. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 99,97% dan capaian kinerja mencapai 872,25 % Dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan target tahun 2025 dalam Renstra hanya 4% dari Jumlah Koperasi yang mendapatkan pelatihan/ Jumlah Koperasi yang aktif sehingga capaian melebihi target;

6. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 98,31% dan Capaian kinerja mencapai 103,60% karena pergeseran anggaran dari perjalanan dinas ke kegiatan bimbingan teknis;
7. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengembangan UMKM sebesar 97,66%, sedangkan untuk capaian kinerja mencapai 138,71 % karena adanya penambahan anggaran kegiatan di perubahan.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholder untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Provinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM di Kabupaten Sukabumi;
2. Dukungan anggaran yang maksimal dalam rangka pencapaian Kinerja;
3. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang memadai;
4. Sarana dan Prasarana yang memadai;
5. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Sukabumi, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SUKABUMI

